

Kantor Stasiun KIPM Baubau Kantor Stasiun
KIPM Baubau Kantor Stasiun KIPM Baubau
Kantor Stasiun KIPM Baubau Kantor Stasiun
KIPM Baubau Kantor Stasiun KIPM Baubau
Kantor Stasiun KIPM Baubau Kantor Stasiun

**LAPORAN KEUANGAN
KANTOR STASIUN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BAUBAU**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
Audited

KIPM Baubau Kantor Stasiun KIPM Baubau
Kantor Stasiun KIPM Baubau Kantor Stasiun
KIPM Baubau Kantor Stasiun KIPM Baubau
Kantor Stasiun KIPM Baubau Kantor Stasiun
KIPM Baubau Kantor Stasiun KIPM Baubau
Kantor Stasiun KIPM Baubau Kantor Stasiun
KIPM Baubau Kantor Stasiun KIPM Baubau
Kantor Stasiun KIPM Baubau

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Stasiun KIPM Baubau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Baubau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Stasiun KIPM Baubau. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Baubau, Januari 2024
Kepala,

Irwati Wijaya, S. Pi., M.P
NIP 19690609 199803 2 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	
A. Laporan Realisasi Anggaran Belanja	
B. Laporan Barang Gabungan Intrakomtebel dan Ekstrakomtebel	
C. Laporan Barang Persediaan	
D. Laporan Rincian Belanja Covid-19	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU**

JALAN SULTAN DAYANU IKHSANUDDIN KOTA BAUBAU
TELEPON / FAXIMILI (0402) 2823214

LAMAN www.kkp.go.id POS ELEKTRONIK baubau@bkipm.kkp.go.id ; skipmbaubau@yahoo.com

Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Baubau yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Baubau, Januari 2024
Kepala,

Yuni Irawati Wijaya, S. Pi., M.P
NIP 19690609 199803 2 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Baubau Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,245,000,- atau mencapai 100 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp5,659,334,864,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5,693,153,000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.815.181.813,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp188.248.146,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp5.626.933.667; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp14.006.605,- dan Rp5.801.175.208,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.245.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional

adalah sebesar Rp5.927.641.073,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(5.927.641.073). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(5.924.396.073),-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp6.069.481.417,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(5.924.396.073) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.656.089.864,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp5.801.175.208,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR STASIUN KIPM BAUBAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	3,245,000	#DIV/0!	56,444,257
JUMLAH PENDAPATAN		-	3,245,000	#DIV/0!	56,444,257
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3,091,156,000	3,087,702,938	99.89	2,988,517,914
Belanja Barang	B.4	2,460,972,000	2,431,834,666	98.82	1,824,518,998
Belanja Modal	B.5	141,025,000	139,797,260	99.13	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH BELANJA		5,693,153,000	5,659,334,864	99.41	4,813,036,912

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR STASIUN KIPM BAUBAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	188,248,146	108,047,109
Jumlah Aset Lancar		188,248,146	108,047,109
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1,055,313,000	1,055,313,000
Peralatan dan Mesin	C.15	5,202,601,131	5,062,803,871
Gedung dan Bangunan	C.16	4,613,880,316	4,613,880,316
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	74,918,725	74,918,725
Aset Tetap Lainnya	C.18	41,785,000	41,785,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5,361,564,505)	(4,873,845,717)
Jumlah Aset Tetap		5,626,933,667	5,974,855,195
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		5,815,181,813	6,082,902,304
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	14,006,605	13,420,887
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14,006,605	13,420,887
JUMLAH KEWAJIBAN		14,006,605	13,420,887
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	5,801,175,208	6,069,481,417
JUMLAH EKUITAS		5,801,175,208	6,069,481,417
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5,815,181,813	6,082,902,304

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR STASIUN KIPM BAUBAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3,245,000	19,010,000
JUMLAH PENDAPATAN		3,245,000	19,010,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,087,702,938	2,988,517,914
Beban Persediaan	D.3	186,434,083	184,302,648
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,328,959,286	1,123,841,396
Beban Pemeliharaan	D.5	260,901,698	294,192,561
Beban Perjalanan Dinas	D.6	575,924,280	291,545,215
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	487,718,788	575,725,724
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		5,927,641,073	5,458,125,458
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(5,924,396,073)	(5,439,115,458)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Depisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5,924,396,073)	(5,439,115,458)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(5,924,396,073)	(5,439,115,458)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR STASIUN KIPM BAUBAU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	6,069,481,417	6,713,721,558
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5,924,396,073)	(5,439,115,458)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	905
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	905
JUMLAH		-	905
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	5,656,089,864	4,794,874,412
EKUITAS AKHIR	E.5	5,801,175,208	6,069,481,417

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Baubau

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau Merupakan salah satu UPT dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di daerah yang terletak di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Baubau dan membawahi 2 Wilayah Kerja yaitu Wilker Raha dan Wanci yang melaksanakan tindakan perkarantinaan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mencapai tujuan karantina yang diamanatkan UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 untuk mensukseskan pembangunan Kelautan dan Perikanan di daerah Kotamadya Baubau dan Nasional pada umumnya memerlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat terarah sesuai tujuan dan target serta berkesinambungan.

Adapun pegawai di Stasiun karantina ikan berjumlah 25 orang dan PPNPN 15 orang.

Rencana Strategis Stasiun KIPM Baubau :

Terdiri dari 1 visi, 1 misi, 3 tujuan dan 4 sasaran antara lain:

Visi : Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya

Misi : Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Mampu menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan terpercaya

Tujuan :

” Peningkatan lalulintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ”

Sasaran :

- ” Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dilingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ”.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun KIPM Baubau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah

sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Stasiun KIPM Baubau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Baubau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Baubau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Baubau adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan

rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai

tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2023 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Stasiun KIPM Baubau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	3,015,520,000	3,091,153,000
Belanja Barang	2,460,972,000	2,460,972,000
Belanja Modal	141,025,000	141,025,000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	5,617,517,000	5,693,150,000

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan
Rp3.245.000,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.245.000,- atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,- Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Baubau terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Karantina (42533)	-	-	#DIV/0!
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi (42528)	-	3,245,000	#DIV/0!
Penerimaan kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (42591)	-	-	-
Jumlah	-	3,245,000	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan Jasa Semester II TA 2023 mengalami penurunan 83,09 persen dibandingkan Semester II TA 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan Peraturan Pemerintah Tentang PNBP dari PP No. 75 Tahun 2015 ke PP No.85 Tahun 2023 yang isi perubahannya adalah tidak adanya lagi Pendapatan Jasa karantina antar domestic yang mana pada tahun-tahun lalu pendapatan jasa karantina untuk SKIPM Baubau lebih banyak diperoleh dari Pendapatan Jasa Karantina Domestik.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Karantina (42533)	-	-	#DIV/0!
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi (42528)	3,245,000	19,191,000	-83.09
Pendapatan Lain-lain (4259)	-	-	#DIV/0!
Jumlah	3,245,000	19,191,000	-83.09

Realisasi

Belanja Negara

Rp5.659.334.86

4,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp5.659.334.864,- atau 99,41% dari anggaran belanja sebesar Rp5.693.153.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester IITA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3,091,156,000	3,087,702,938	99.89
Belanja Barang	2,460,972,000	2,431,834,666	98.82
Belanja Modal	141,025,000	139,797,260	99.13
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	5,693,153,000	5,659,334,864	99.41
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	5,693,153,000	5,659,334,864	99.41

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar (17.58)% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Adanya anggaran belanja modal dan penambahan Gaji Pegawai PPPK sehingga terjadi Kenaikan Pagu di DIVA pada Semester TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,087,702,938	2,988,517,914	3.32
Belanja Barang	2,431,834,666	1,824,518,998	33.29
Belanja Modal	139,797,260	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	5,659,334,864	4,813,036,912	17.58

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**
Rp3.087.702.938,-

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.087.702.938,- terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp0,- dan Rp2.988.517.914,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Semester II TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 3.32 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang naik pangkat dan naik grade Tunjangan kinerja (tukin).
2. Adanya penambahan pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,087,702,938	2,988,517,914	3.32
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	#DIV/0!
Belanja Honorarium	0	0	#DIV/0!
Belanja Lembur	-	-	#DIV/0!
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	3,087,702,938	2,988,517,914	3.32
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	3,087,702,938	2,988,517,914	3.32

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**
Rp2.431.834.666,-

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.431.834.666,- dan Rp1.824.518.998,- Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan (33.29)% dari Realisasi Belanja

Barang TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya Pengurangan anggaran dari TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	970,008,788	743,778,698	30.42
Belanja Barang Non Operasional	1,500,000	44,186,405	(96.61)
Belanja Jasa	297,113,400	299,014,464	(0.64)
Belanja Pemeliharaan	235,333,746	261,197,711	(9.90)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	575,924,280	291,545,215	97.54
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	351,954,452	184,796,505	90.46
Jumlah Belanja Kotor	2,431,834,666	1,824,518,998	33.29
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2,431,834,666	1,824,518,998	33.29

*Belanja Modal
Rp139.797.260.-*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp139.797.260,- dan Rp0,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester II TA 2023 mengalami kenaikan sebesar (100)% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh di Anggarkan Kegiatan Tersebut di TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139,797,260	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelolaan	0	0	0.00
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	139,797,260	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	139,797,260	0	#DIV/0!

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak Ada Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2023 sebesar Rp.0 dan TA 2022 Rp0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp Rp139.797.260.-.- mengalami Kenaikan sebesar (100) persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp0.- Hal ini disebabkan oleh diadakannya belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan mesin	139,797,260	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelolaan	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	139,797,260	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	139,797,260	0	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 Rp0,- dan TA 2022 Rp0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp.0,- dan TA 2022 Rp. Rp0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2023 dan TA 2022.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0,-*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2023 dan 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
-	0	0	#DIV/0!
-	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan
2022*

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
Bank Mandiri	8100126497921000	-
Jumlah	8,100,126,497,921,000	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0., pembayaran jasa karantina di SKIPMKHP Baubau langsung ke kas Negara dengan menggunakan transaksi Billing dan rekening bank Bendahara Penerimaan di gunakan hanya untuk keperluan persyaratan pembuatan Electronic Data Capture (EDC) . Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
BSI 1057929673	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 Rp0,- dan 2022 Rp0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB **C.4 Piutang PNB**

Rp0,-

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2023 dan 2022

Uraian	TH 2023	TH 2022
Piutang PNB (Pengembalian Tukin)	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2023	TH 2022
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp(5.201). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
TA 2023 dan 2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0,*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan 0,- Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp188.248.146,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp188.248.146,- dan Rp108.047.109,- untuk pencatatan persediaan bahan baku di SKIPMKHP BAUBAU menggunakan dua aplikasi yaitu aplikasi Persediaan dan Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium (SILAB) yang mana perbedaan dari Aplikasi ini adalah Aplikasi Persediaan yang Ada di BMN menggunakan perhitungan dengan satuan Kemasan/Botol sedangkan Aplikasi SILAB menggunakan perhitungan satuan Volume/gram pada TA 2023 tidak ada selisih antara Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SILAB.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	34,444,524	24,004,852
Barang untuk Pemeliharaan	5,575,250	7,000,210
Pita Cukai, Materai dan Legas	-	-
Bahan Baku	145,015,972	73,237,405
Suku Cadang	3,212,400	3,804,642
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	188,248,146	108,047,109

Di Persediaan barang yang rusak/usang dengan Nilai biaya Rp0,-

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2023 dan
2022*

No	Debitur	TH 2023	TH 2022
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2023 dan 2022

No	Debitur	TH 2023	TH 2022
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang TA 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp1.055.313.000,

-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Baubau per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.055.313.000.- dan Rp1.055.313.000.- (tidak ada nilai tambah) Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	1,055,313,000
Mutasi tambah:	0
Pengembangan Melalui KDP (208)	0
Mutasi kurang:	0
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 desember 2023	1,055,313,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	500 m2	Jl. Anoa Lrng. Karantina Ikan Kota Baubau	163,210,000
2	470 m2	Jl. Dayanu Ikhsanuddin Kota Baubau	407,208,000
3	5.00 m2	Kel. Leworu Kota Raha Kab. Muna	265,421,000
4	1415 m2	Jl. Bira Mekar Kota Wangi Wangi Kab. Wakatobi	219,474,000
Jumlah			1,055,313,000

Tidak ada Tanah yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

*Peralatan dan
Mesin*

Rp5.202.601.131,

-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp5.202.601.131,- dan Rp5.062.803.871,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5,062,803,871
Mutasi tambah:	
Pembelian	139,797,260
Transfer Masuk	0
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	0
Hibah Barang	0
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	4,610,472,701
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2022	592,128,430
Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	592,128,430

Terdapat Mutasi tambah sebesar Rp139.797.260,- Pada Aset Peralatan dan Mesin dan mutasi kurang sebesar (Rp4.238.373.239,- dan Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,- sedangkan Saldo awal Rp5.062.803.871,- Kegiatan pada periode Semester II Tahun 2023 ada Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Gedung dan
Bangunan*

*Rp4.613.880.316,
-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp4.613.880.316,- dan Rp4.613.880.316,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4,613,880,316
Mutasi tambah:	-
Penyelesaian pembangunan dgn KDP	-
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Perubahan Nilai Bangunan	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	4,613,880,316
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	615,186,479
Nilai Buku per 31 Desember 2023	5,229,066,795

pada periode Semester II Tahun 2023 Tidak ada kegiatan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi*
Rp74.918.725,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp74.918.725,- dan Rp74.918.725,- Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	74,918,725
Mutasi tambah:	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	74,918,725
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	22,412,842
Nilai Buku per 31 Desember 2022	97,331,567

Tida ada tambah Jalan Irigasi dan Jaringan pada periode Tahunan Tahun 2023.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp41.785.000,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp41.785.000,- dan Rp41.785.000,- Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023.

Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-	Monografi	70	41,785,000	0	41,785,000
Jumlah		70	41,785,000	0	41,785,000

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian KDP Gedung Bangunan Instalasi Stasiun KIPM Baubau Sebagai Berikut :

Nomor SP2D	Tanggal SP2D	SPK	Nilai SP2D
Jumlah			-

*Akumulasi
Penyusutan Aset*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31

Tetap
Rp(5.361.564.505
),-

Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(5.361.564.505) dan Rp(4.873.845.717). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2023 dan 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,202,601,131	4,610,472,701	592,128,430
2	Gedung dan Bangunan	4,613,880,316	728,678,962	3,885,201,354
3	Penyusutan jaringan	74,918,725	22,412,842	52,505,883
4	Aset Tetap Lainnya	41,918,725	0	41,918,725
Akumulasi Penyusutan		9,933,318,897	5,361,564,505	4,571,754,392

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2023

Uraian	Nilai Perolehan
-	0
-	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain
Rp0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset

Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka

C.24 Uang Muka dari KPPN

dari KPPN Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Pihak Ketiga

Rp14.006.605,

-

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp14.006.605,- dan Rp13.420.887,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Stasiun KIPM Baubau per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Tagihan Listrik Bulan Desember 2022	10,223,157	Beban Langganan Listrik
Tagihan Telefon Bulan Desember 2022	-	Beban Langganan Telfon
Tagihan Internet Bulan Desember 2022	3,150,198	Beban Langganan Internet
Tagihan PDAM Bulan Desember 2022	633,250	Beban Langganan PDAM
Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Oktober s.d Desember 2022	-	Beban Gaji Pokok PNS
Total	14,006,605	

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Total	-

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	TH 2022	TH 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas

Rp5.801.175.208,

-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.801.175.208,- dan Rp6.069.481.417,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp3.245.000,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.245.000,- dan Rp19.191.000,- Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk Semester II Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA2023 dan
2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
PNBP	3,245,000	19,191,000	(83)
Pendapatan Lain-lain	0	0	#DIV/0!
Jumlah	3,245,000	19,191,000	(83)

Pendapatan Jasa berasal dari Pendapatan Jasa

Karantina Perikanan Rp0,- dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya Rp3.245.000,- (PP No.85 Thn 2023) Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu Rp0,-

Beban Pegawai
Rp3.087.702.938,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Semester II Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.087.702.938,- dan Rp2.988.517.914,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1,061,154,000	1,045,303,400	2
Beban Tunjangan-tunjangan	451,992,713	468,152,933	(3)
Pengembalian beban Tuj PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Pegawai (Tunj Khusus/kegiatan)	1,438,554,150	1,371,370,288	
Beban Pembulatan Gaji PNS	14,075	17,239	
Beban Lembur	132,383,000	103,674,000	28
Jumlah	3,084,097,938	2,988,517,860	3

Beban
Persediaan

D.3 Beban Persediaan

Rp186.434.083,- Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp186.434.083,- dan Rp184.302.648,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester II Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	104,297,878	81,287,148	28
Beban untuk pemeliharaan		0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Baku	82,136,205	103,015,500	(20)
Beban suku cadang	-	0	#DIV/0!
Jumlah Beban Persediaan	186,434,083	184,302,648	1

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1.328.959.286,
-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.328.959.286,- dan Rp1.123.841.396,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester II Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	700,838,533	509,418,896	38
Beban Penambah Daya Tahan tTubuh	110,352,000	100,160,000	10
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	886,000	3,868,000	(77)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	107,850,000	125,322,000	(14)
Beban Barang Operasional Lainnya	41,922,255	44,186,405	(5)
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Beban Bahan	59,751,380	35,213,100	70
Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	8,160,000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,500,000		#DIV/0!
Beban Daya dan Jasa	297,699,118	297,512,995	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	
Jumlah	1,328,959,286	1,123,841,396	37.58

Beban Pemeliharaan Rp260.901.698,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp260.901.698,- dan Rp294.192.561,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester II Tahun 2023 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	T.A. 2023	T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	122,700,750	150,099,100	(18)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112,632,996	111,098,611	1
Beban BMP dan Pelumas	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	23,955,710	28,499,650	(16)
Beban persediaan suku cadang	1,612,242	4,495,200	(16)
Jumlah	260,901,698	294,192,561	-11.32

Beban Perjalanan **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

*Dinas
Rp575.924.280,-*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp575.924.280,- dan Rp291.545.215,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	513,343,059	272,188,715	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,640,000	11,730,000	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37,941,221	7,626,500	-
Jumlah	575,924,280	291,545,215	#DIV/0!

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada

Masyarakat TA2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Jumlah	0	0	-

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Semester II Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	-	-

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp487.718.788,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp487.718.788,- dan Rp575.725.724,-

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat

aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	372,099,462	460,106,399	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	113,492,483	113,492,483	-
Beban Penyusutan Jaringan	2,126,843	2,126,842	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	-	-	-
Jumlah Penyusutan	487,718,788	575,725,724	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	487,718,788	575,725,724	-

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

TA2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp(0),-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	-
Surplus Pendapatan dari kegiatan Non Oprasional Lainnya	0	0	
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Beban Persediaan Rusak	0	0	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	-

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp6.069.481.417,

-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.069.481.417,- dan Rp6.713.721.558,-

Defisit LO

Rp(5.924.396.073

)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(5.924.396.073) dan Rp(5.439.115.458) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Persediaan
Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0,-*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp(3.235.400). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp5.656.089.864,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.656.089.864,- dan Rp4.794.874.412,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	3,245,000
Ditagihkan ke Entitas Lain	5,659,334,864
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	5,662,579,864

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp(3.245.000),- sedangkan DKEL sebesar Rp5.659.334.864,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	-	-
3	Persediaan	Sertifikat HC	-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0-. yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2	-	-	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir

Rp5.801.175.208,

-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.801.175.208,- dan Rp6.069.481.417,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak Terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.14/MEN/KU.611/2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Pejabat Pengelola Keuangan Stasiun KIPM Baubau sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen : Yuni Irawati
Wijaya, S. Pi., M.P
2. Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM: Suryatmoko
RHP, SE., M.Si
3. Bendahara Pengeluaran : Ni Kadek
Wirati
4. Bendahara Penerimaan : Andi Cakra MP